



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 62 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 62**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN TAHUN 2023**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di

Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, provinsi yang dituangkan dalam renja Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Garut dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 dan 2022 karena *recofusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan **Corona Virus Disease 19** dimasukkan dalam Renja 2023 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2023 di susun dengan berpedoman kepada :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD sedangkan Tujuan penyusunan Renjata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas pembangunan pariwisata melalui perumusan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dan memberikan arah acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2023 disusun sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

*Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan*

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

*Memuat rumusan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

*Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan*

##### **BAB IV RENCANA KERJA**

*Menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan unit kerja pengelola kegiatan*

##### **BAB V PENUTUP**

*Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Renjata serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut*

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan pada tahun pelaksanaan program kegiatan yang telah berakhir yaitu Tahun 2021. Analisis pencapaian kinerja organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2019-2024 serta indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kunjungan wisata;
2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;

Sesuai dokumen perjanjian kinerja, ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN				
URAIAN		INDIKATOR		TARGET
1.	Meningkatnya kunjungan wisata	a.	Jumlah Kunjungan wistawan (orang)	1.800.000 Orang
2.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	a.	Indek Pemajuan Kebudayaan	27%

Hasil pencapaian kinerja sasaran pada tahun lalu dijelaskan sebagai berikut :

##### A. Sasaran 1: Meningkatnya kunjungan wisata

Sasaran 1. Meningkatnya kunjungan wisata terdiri dari satu indikator yaitu (a) Jumlah kunjungan wisatawan.

Hasil dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 119% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1**

**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2021	Hasil Tahun 2021	Tingkat Capaian 2021 thd Target (%)	Tercapai/Tidak	Target Akhir RENSTRA
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.397.023 Orang	1.800.000 Orang	2.152.000 Orang	119%	√	3.210.000 Orang

**Ket :** √ = mencapai target  
X = tidak mencapai target.

**B. Sasaran 2: Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan**

Sasaran 2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri dari satu indikator yaitu (a) Jumlah seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan.

Hasil dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 100 % dengan kriteria **“Baik”**. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**

**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2021	Hasil Tahun 2021	Tingkat Capaian 2021 thd Target (%)	Tercapai/Tidak	Target Akhir RENSTR A
1	Indek Pemajuan Kebudayaan	27%	27%	27%	100,00	√	27%

**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan**  

$$\frac{\text{Jumlah OPK}}{\text{Jumlah OPK}} \times 100 \%$$

**Ket :** √= mencapai target  
X = tidak mencapai target.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2021 terdiri dari dua sumber anggaran yaitu APBD II, APBD I (BANPROV) dan Pusat (DAK) Non Fisik. Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 7 program dan 11 kegiatan serta 26 sub kegiatan dengan anggaran atau pagu sebesar Rp. 53.030.850.228,-.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya penyediaan, pemeliharaan dan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran guna memperlancar kinerja SKPD. Anggaran yang disediakan untuk *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* sebesar Rp. 8.816.329.060,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.273.642.305,- yang digunakan untuk membiayai 4 (empat ) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 45.874.300,- realisasi sebesar Rp 27.417.874,- yang dipergunakan untuk belanja telepon, listrik dan air selama 12 bulan;
- b. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/Lapangan sebesar Rp. 15.500.000,- realisasi Rp. 8.027.700 yang dipergunakan pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 31 unit.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebesar Rp. 65.991.335,- realisasi sebesar Rp 65.870.400,- yang dipergunakan untuk pembayaran pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan sebanyak 8 unit.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 577.201.968,- realisasi sebesar Rp. 574.340.022, -. yang dipergunakan untuk belanja jasa kebersihan dan jasa pelayanan umum ,belanja jasa keamanan selama 12 bulan.

- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 84.622.022,- realisasi sebesar Rp 84.096.000,-. yang dipergunakan untuk Belanja ATK dan bahan benda pos lainnya selama 12 bulan;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 145.024.200,- realisasi sebesar Rp. 120.233.000,-. yang dipergunakan untuk pengadaan 20 jenis barang cetak dan penggandaan sebanyak 165.880 lembar
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 58.974.275,- realisasi Rp. 58.974.275,- yang dipergunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik sebanyak 8 jenis selama 12 bulan;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 342.154.200,- realisasi sebesar Rp. 327.071.000,-. yang dipergunakan untuk belanja bahan perabot kantor belanja mebel dan komputer;
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 10.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.891.800,-. yang dipergunakan untuk 4 jenis Surat Kabar dan 14 iklan;
- j. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 37.140.000,-realisasi sebesar Rp. 37.140.000,-. yang dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu dan rapat sebanyak 1350 dus/ orang;
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 198.450.000,-realisasi sebesar Rp. 198.420.000,-. Yang dipergunakan untuk perjalanan dinas luar daerah sebanyak 175 kali dengan hasil terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- l. Pemeliharaan Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 22.960.000,-realisasi sebesar Rp. 22.960.000,-. yang dipergunakan untuk Pemeliharaan Alat-alat kantor.
- m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 448.744.000,- realisasi sebesar Rp 384.909.000,- yang dipergunakan untuk Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- n. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 6.762.762.760,- realisasi sebesar Rp. 6.353.291.305,- untuk pembayaran Gaji dan

Tunjangan ASN dinas pariwisata dan kebudayaan sebanyak 62 orang.

## **2. Program Pengembangan Kebudayaan**

Sasaran program Pengembangan Kebudayaan adalah Melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah dan meningkatkan pelestarian budaya daerah, sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengembangan budaya daerah. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.481.310.458,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.416.193.651,- untuk membiayai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Pelindungan ,pengembangan,pemanfaatan objek pemajuan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 4.381.310.558,- realisasi Rp. 4.319.591.251 berupa kegiatan untuk pemberian Hibah alat kesenian kepada Grup kesenian dan memfasilitasi pelaksanaan upacara adat di 15 situs, serta untuk penataan Gedung Art Center.
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 99.999.900,- realisasi Rp. 96.602.400,- untuk melaksanakan pelatihan dan Dialog Desa Pemajuan Kebudayaan.

## **3. Program Pembinaan Sejarah**

Sasaran program Pembinaan Sejarah ini adalah meningkatnya SDM sejarah yang terdidik serta meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya daerah . Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 199.389.200,- untuk membiayai 1 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi sejarah dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- realisasi Rp. 199.389.200,- dengan kegiatan penggandaan Buku sejarah.

## **4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Sasaran program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah Melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar budaya daerah dan meningkatkan pelestarian Benda Cagar Budaya

daerah, dengan sasaran adalah terlindunginya benda Cagar budaya. Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 149.920.200,- yang terealisasi sebesar Rp. 135.276.200,- dialokasikan untuk membiayai 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp 149.920.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 135.276.200,- hasil kegiatan tersebut adalah Terpeliharanya benda cagar budaya yang ada di daerah dan diberikan honor Juru Pelihara (JUPEL) selama 12 bulan sebanyak 25 jupel yang mendapatkan honor.

## **5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Sasaran program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah meningkatkan kualitas objek wisata, sedangkan sasaran dari program ini adalah tertatanya pengembangan obyek wisata dan Desa Wisata .Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 37.536.457.010,- realisasi sebesar Rp. 31.376.292.928 ,- yang dialokasikan untuk membiayai 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- o. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp. 34.291.449.010 (DAU dan BANPROV),- dengan realisasi Rp. 28.453.918.733.,- hasil kegiatan tersebut adalah tertatanya pengembangan daya Tarik destinasi obyek wisata situ Sayang Heulang dan penataan DTW dan pengembangan Desa Wisata.
- p. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota anggaran sebesar Rp. 299.744.000 (DAK non Fisik),- realisasi Rp. 299.744.000,- hasil kegiatan tersebut adalah Pelantihan SDM kepariwisataan sebanyak 10 kali pelatihan.
- q. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.945.264.000,-(DAK Fisik) realisasi Rp. 2.622.630.195 hasil kegiatan tersebut adalah tertatanya pengembangan destinasi obyek wisata di Canguang .

## **6. Program Pemasaran Pariwisata**

Sasaran Program Pemasaran Pariwisata adalah meningkatkan jaringan kerjasama promosi wisata, sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya efektifitas sistem informasi serta kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 959.999.500,- yang realisasi sebesar Rp. 822.015.300,- yaitu dialokasikan untuk membiayai 2 Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dengan anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 449.999.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 445.200.500,- hasil kegiatan tersebut adalah terpromosikannya potensi pariwisata melalui pameran dan promosi melalui media cetak dan elektronik.
- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kab/kota Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 510.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 376.814.800,- hasil kegiatan tersebut adalah pelatihan penguatan kualitas dan citarasa UKM serta pemberian Hibah uang kepada ICA dan BPPD sebagai Mitra pariwisata.

## **7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Sasaran Program ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dana yang dialokasikan untuk menunjang program ini sebesar Rp. 886.834.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 876.831.600,- untuk membiayai 1 (Satu) Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 530.826.000,- yang bersumber dari dana DAK Non Fisik dan DAU dengan Realisasi Rp. 520.283.600,- hasil kegiatan tersebut adalah pelatihan kepariwisataan 3 kali pelatihan;

- b. Sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 356.548.000,- yang bersumber dari dana DAK non Fisik dengan realisasi sebesar Rp. 356.548.000,- hasil dari kegiatan ini merupakan Pelatihan SDM Kepariwisata sebanyak 3 kegiatan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 180 orang.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Disparbud  
s/d Tahun 2021  
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Disparbud Kab.Garut

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pariwisata dan Kebudayaan									
	Bidang Urusan									
	PROGRAM									
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase peningkatan IKM								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk						1 aplikasi		
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan			31 unt	31 unit	100	31 unit kendaraan		

			Penyediaan Jasa Asuransi	Jumlah obyek wisata yang mendapatkan asuransi			7 objek	7 objek	100	7 OTW		
			Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa kebersihan dan pembelian alat			2 jenis	2 jenis	100	16 orang 20 jenis		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor			12 bln	12 bln	100	52 jenis		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang cetakan dan penggandaan			15 jenis	15 jenis	100	3 orang, 17 jenis dan 194,608 lembar		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian komponen alat listrik			9 jenis	9 jenis	100	6 jenis		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran surat kabar,majalah dan jilid						60 surat kabar, 10 buku		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk pegawai, tamu dan			12 bln	12 bln	100	1050 org		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 jenis	2 jenis	100	17 jenis		
			Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah			12 bln	12 bln	100	194 kali		
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis	Jumlah pembayaran honor TKK			61 orang	61 orang	100	10 org, 3jenis		
			Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	jumlah Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			12 bln	12 bln	100	237 kali		
			Pengelolaan Hotel Cipanas Indah	Jumlah pembayar honor pegawai CI dan pembelian alat kebersihan			12 bln	12 bln	100	6 jenis		

			Sistem Informasi Manajemen Pegawai Internal	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen pegawai internal						1 aplikasi		
			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase peningkatan sarana aparatur								
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas			5 mobil dan 15 motor	5 mobil dan 15 motor	100		9 mobil, 22 motor	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah terpeliharanya gedung			1 gedung	1 gedung	100		1 gedung	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara							15 komputer, 10 printer	
			Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Jumlah pembelian kendaraan roda 4			roda 4 (1) dan roda 2 (1)	roda 4 (1) dan roda 2 (1)	100			
			<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase peningkatan disiplin pegawai								
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian yang dibeli			105 stel, 36 stel	105 stel, 36 stel	100			
			<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase peningkatan sistem pelaporan								
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja			3 jenis	3 jenis	100			
			<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	Persentase peningkatan pengembangan destinasi	14.100.000 orang	7.287.795 orang	1.800.000 orang	2.152.000 orang	104,56 %		3.008.000 orang	1.126.960 orang
			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah DTW yang ditata								

			Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah objek wisata yang ditata						5 DTW		
			Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Jumlah DTW yang ditata			4 DTW	4 DTW	100	12 DTW		
			Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah objek wisata yang dibangun kolam air						1 lokasi		
			Pemetaan Destinasi Wisata di Kabupaten Garut	TW yang dipetakan			1 dokumen	1 dokumen	100			
			Perluasan Pengadaan Tanah Makam Syeh Jafar Sidik	Jumlah tanah yang dibeli			M2	M2	100	987 M2		
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut , Penataan Kawasan Pariwisata ,Kegiatan Masterplan	Jumlah kajian								
			Penataan Kawasan Pariwisata	Jumlah DTW yang ditata			1 dokumen	1 dokumen	100			
			Penyusunan DED	Jumlah dokumen DED						1 dokumen		
			Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Garut	Jumlah RIPPARDA yang disusun						1 Dokumen RIPPARDA		
			Sosialisasi Kepariwisataan	Jumlah Sosialisasi Kepariwisataan						7 kali		
			Skenario Penataan Daya Tarik Wisata	Jumlah perencanaan penataan			1 dokumen	1 dokumen	100			
			<b>Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>	Persentase peningkatan pengembangan								
			Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah SDM Balawista yang terdidik			7 kelompok	7 kelompok	100			

			Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Jumlah rapat koordinasi			6 lembaga	6 lembaga	100			
			Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Kuliner/Cendramat	Jumlah SDM pelaku usaha pariwisata yang terdidik			40 orang	40 orang	100			
			Database Kepariwisataan	Jumlah data kepariwisataan yang terdokumentasikan			buku	buku	100			
			<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	Persentase peningkatan pengembangan pemasaran								
			Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah pameran yang dilaksanakan			20 DTW	20 DTW	100	1 kali		
			Pembuatan Material Promosi	Jumlah jenis material promosi						2 jenis		
			Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah peserta Mojang dan Jejaka			20 negara	20 negara	100	40 org		
			Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata	Jumlah data informasi pariwisata						2 data		
			Pengembangan Pariwisata Melalui Audio Visual	Jumlah sarana promosi						1 jenis		
			Adventur Wisata	Jumlah DTW yang terpromosikan			1 DTW	1DTW	100			
			Pelatihan Pemandu Wisata	Jumlah SDM Pemandu wisata yang terdidik			40 orang	40 orang	100			
			Informasi Pariwisata melalui Media Elektronik	Jumlah potensi wisata yang terpromosikan			30 DTW	30 DTW	100			
			Promosi Pariwisata Kabupaten Garut di Media Online Nasional	Jumlah promosi pariwisata melalui media online			30 DTW	30 DTW	100			
			Revitalisasi Website	Jumlah pengembangan jaringan			1 paket	1 paket	100			

			Guide Book Informasi Pariwisata	Jumlah sarana promosi dibuat			2 jenis	2 jenis	100			
			Pemanfaatan Cipanas Indah Melalui Kerjasama Pemanfaatan(KSP)	Jumlah pemanfaatan cipanas indah yang dipihak ketigakan								
			<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	Persentase peningkatan pengembangan nilai budaya								
			Pagelaran Anugrah Budaya yayasan Pemanah Rasa Nusantara	Jumlah pagelaran seni budaya			16 orang	16 orang	100			
			Kaulinan Barudak Urang Lembur	Jumlah permainan tradisional yang dilestarikan			1 jenis	1 jenis	100			
			Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah kegiatan Upacara Tradisional dan kegiatan budaya lainnya						11 kali		
			Pelatihan Instruktur Pencak Silat Bagi Pemuda dan Pewaris Budaya di Padepokan Pasir Intan Puseur	Jumlah peserta pelatih						40 orang		
			Cerita Garut	Jumlah siswa yang mengenal sejarah			1500 siswa	1500 siswa	100			
			Sosialisasi Batik Garutan	Jumlah siswa yang mengela batik garutan			50 siswa	50 siswa	100			
			Penyusunan Update Buku Budaya Garut	Jumlah buku budaya garut yang update			1246 exsp	1246 exsp	100			
			Penyusunan Profil Tokoh Garut	Jumlah fropil tokoh garut yang terdokumentasikan			1253 exsp	1253 exsp	100			
			<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Persentase peningkatan pengelolaan								
			Pencatatan dan Inventarisasi Cagar Budaya dan Benda Peninggalan Sejarah	Jumlah Cagar budaya dan benda peninggalan sejarah yang terinventarisir			9 CB	9CB	100	20 CB dan 2 dokumen		

			Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah pelestarian peninggalan sejarah								
			Pengadaan Benda Peninggalan Sejarah	Jumlah benda peninggalan sejarah yang dilestarikan			8 buah	8 buah	100			
			Pelestarian Cagar Budaya dan objek yang diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan benda peninggalan keperbukalaan/ sejarah (OCB) yang						20 CB + 5 dokumen		
			Pembuatan Replika Cagar Budaya	Jumlah replika yang dibuat			15 buah	15 buah	100			
			Pembinaan Juru Pelihara (Jupel)	Jumlah Juru Pelihara yang terbina						30 orang		
			<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	Persentase peningkatan pengelolaan keragaman biudaya								
			Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	Jumlah sgroup kesenian yang mengikuti pagelaran						188 orang		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah peserta kolaborasi music etnis			25 group	25 group	100	140 orang		
			Apresiasi Seni Daerah	Jumlah pagelaran			25 group	25 group	100			
			Revitalisasi Seni Tradisional	Jumlah kesninan yang di Revitalisasikan dan dipergelarkan						24 kali		
			Garut Intan Carnival	Jumlah desainer yang terlibat dalam			50 kelompok	50 kelompok	100	6 jenis		

				Pengembangan Seni Tradisional	Jumlah seniman yang mendapatkan hibah alat kesenian			14 group	14 group	100	22 grup	
				Pengembangan Seni Modern	Jumlah grup yang mendapatkan hibah kesenian						9 grup	
				Pentas seni di Objek Wisata	Jumlah grup seni yang pentas di objek wisata						12 grup	
				Gelar Seni Penyambutan dan Gelar Senja	Jumlah pagelaran			13 kali	13 kali	100	25 kali	
				Pagelaran Seni Budaya	Jumlah seni budaya yang mengikuti			3 group	3 group	100		

Keterangan :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 2021 telah berhasil Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Obyek pemajuan Kebudayaan sebanyak 4 OPK dengan program dan kegiatan adalah

1. Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dimana setiap situs difasilitasi dalam upacara adat dan seminar pemajuan kebudayaan.
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Obyek yang Diduga Cagar Budaya, dalam kegiatan ini memfasilitasi honor para jupel untuk menjaga dan memelihara Cagar Budaya
3. Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Apresiasi Seni Daerah, Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Gelar Seni Penyambutan dan Gelar Senja, penataan gedung art center, dimana dalam kegiatan ini menyelenggarakan pagelaran seni tradisional.

Dan target meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut untuk tahun 2021 (Perubahan) sebanyak 1.800.000 orang realisasi 2.152.000 orang dari program dan kegiatan :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Penataan Kawasan Pariwisata (DAK), Pengembangan obyek pariwisata unggulan dan penataan / relokasi kios
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri, Pembuatan Material Promosi dan Pengembangan Pariwisata Melalui Media Elektronik, dimana dalam kegiatan ini berupa mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Garut melalui Pameran baik di Provinsi Jawa Barat dan diluar provinsi Jawa Barat, melalui media cetak maupun media elektronik dan membuat sarana promosi seperti peta wisata, goide books
3. Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata, Pelayanan Kepariwisataan, dimana dalam kegiatan ini sasarannya meningkatkan kerjasama dalam pengembangan pariwisata dan meningkatkan SDM pariwisata.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Pelayanan SKPD dilakukan berdasarkan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2022. Pencapaian target RENSTRA dapat dilihat pada table dibawah ini. Untuk lebih jelasnya, target dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan dan masing-masing indikator termasuk proyeksi capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/st an dar nasion	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (tnn +1)	Tahun 2022 (thn+2)	Tahun 2023 (thn+3)	Tahun 2024 (thn n+4)	Tahun 2021 (thn n-)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(12)	(13)	
	Jumlah kunjungan wisatawan			2.880.972 orang	2.900.000 orang	1.800.000 orang	3.008.000 orang	3.109.000 orang	3.210.000 orang	2.152.000 orang	3.008.000 orang	3.109.000 orang		
	Jumlah seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan			4 jenis	4 jenis	27%	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4jenis	4 jenis	4 jenis		

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada dasarnya pembangunan dan penataan Kabupaten Garut adalah untuk kesejahteraan warganya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan, namun demikian daya tarik Kabupaten Garut kenyataan dapat menarik wisatawan dari wilayah lain bahkan negara lain. Kabupaten Garut merupakan salah satu destinasi

wisata unggulan pariwisata Provinsi Jawa Barat . Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut merupakan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga mampu memacu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata seperti akomodasi, makanan, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan usaha lain yang terkait.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

1. Infrastruktur dasar pariwisata belum optimal, faktor yang mempengaruhi secara internal koordinasi, Master Plan sedangkan secara eksternal adalah dana dan ego sektoral
2. Sadar wisata dan sapta pesona masih kurang dikarenakan kurangnya koordinasi dan pembinaan (internal) sedangkan secara eksternal kultur masyarakat yang masih kuat.
3. Masih kurangnya promosi disebabkan kurangnya material promosi dan partisipasi pelaku usaha pariwisata.
4. Pelestarian seni budaya daerah belum optimal karena tidak adanya Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKEDA) dan kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat .
5. Belum adanya data pelaku usaha Ekonomi Kreatif

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana menuju dan di obyek wisata
2. Kurangnya pemahaman tentang sadar wisata dan sapta pesona
3. Kurangnya promosi pariwisata
4. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya
5. Belum dilakukannya pendataan pelaku Ekonomi kreatif

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sebagaimana program dan kegiatan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun anggaran 2023, setelah

melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan program, kegiatan dan anggaran yang menjadi garapan tahun 2023 telah sesuai dengan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

Tabel T-C.31.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah: Disparbud Kab. Garut

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuh an Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>										
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
	Penyusunan Dokumen Percanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Percanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokume n	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	10.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 Laporan	25.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	25.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Org/bln	7.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Org/bln	7.000.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	440.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	440.000.000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	147.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	147.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	46.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	46.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	198.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	198.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	600.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	600.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	580.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	580.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	98.515.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	98.515.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	95.282.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	95.282.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.431.991.881	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.431.991.881

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	97.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	97.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	23.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	23.500.000	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	33.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	30.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	969.531.08 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	969.531.08 0	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	100.000.00 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	100.000.00 0	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	50.000.000	

	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					
	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	563.630.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	563.630.000			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	150.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	150.000.000			
	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	6.020.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	6.020.000.000			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>						
	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						

	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25 Orang	130.505.400	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25 Orang	130.505.400	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>					<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>					
	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	150.000.000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	150.000.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	20.000.000	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					
	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	50.000.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	50.000.000	
	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	646.387.700	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	646.387.700	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>					
	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>					

	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	150.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	150.000.000	
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Unit	100.000.000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Unit	100.000.000	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	200.000.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	200.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>					
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>					
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Lokasi	1.000.000.000	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Lokasi	1.000.000.000	
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	44.600.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	44.600.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.545.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.545.000	

	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Kawasan	200.000.000	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Kawasan	200.000.000	
	Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit	500.000.000	Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit	500.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	500.000.000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	500.000.000	
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	1.000.000.000	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	1.000.000.000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	1.000.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	1.000.000.000	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	500.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	500.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	183.886.096	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	183.886.096	

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	525.810.700	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	525.810.700	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
Pengelolaan Investasi Pariwisata		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	2 Laporan	100.000.000	Pengelolaan Investasi Pariwisata		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	2 Laporan	100.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 Laporan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 Laporan	100.000.000	
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	10 Unit Usaha	200.000.000	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	10 Unit Usaha	200.000.000	
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>					<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>					

	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	400.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	400.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	300.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	300.000.000
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	300.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	300.000.000
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	150.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	150.000.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>					<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>				

	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang	170.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang	170.000.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	300.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	300.000.000	
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	150.000.000	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	150.000.000	
	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	200.000.000	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	200.000.000	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konservasi dan Konsumsi Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konservasi dan Konsumsi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	500.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konservasi dan Konsumsi Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konservasi dan Konsumsi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	500.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	400.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	400.000.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 merupakan usulan hasil Musrembang baik tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Serta isu-isu penting yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Disparbud

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan	27 %	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya Dalam Kab/Kota				
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Peningkatan Tradisi Budaya	Kab.arut	Jumlah Group kesenian yang menerima Hibah alat kesenian	87 group	
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Pengembangan Daerah Tujuan PariwisataPengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab.Garut	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan	42 Desa Wisata	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sebagaimana misi yang diemban oleh Kementerian Pariwisata RI dalam pembangunan pariwisata dan Kementerian Pendidikan, yakni antara lain:

1. Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala
2. Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal
3. Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal
4. Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan
5. Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum
6. Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event
7. Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yang kondusif
8. Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana strategis dengan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

*Visi :*

Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

*Misi :*

- 2.5.1.** Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya
- 2.5.2.** Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
- 2.5.3.** Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang
- 2.5.4.** Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

*Tujuan :*

- 2.5.4.1.** Meningkatkan pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan.
- 2.5.4.2.** Meningkatkan lama kunjungan wisatawan

*Indikator Tujuan :*

- 2.5.4.2.1.** Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan.
- 2.5.4.2.2.** lama kunjungan wisatawan

Sasaran :

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Obyek pemajuan kebudayaan
2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

Indikator Sasaran :

- 2.5.4.2.2.1.1.1.** Indek pemajuan kebudayaan
- 2.5.4.2.2.1.1.2.** Jumlah kunjungan wisatawan

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Tahun anggaran 2023 adalah meningkatnya pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan 4 obyek pemajuan kebudayaan dan meningkatnya lama kunjungan wisatawan selama 2 hari sedangkan sasarannya adalah meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan sebanyak 27% obyek pemajuan kebudayaan dan meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara sebanyak 3.109.000 orang.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2021 yang mendukung pada peningkatan pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan daerah sebanyak 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Bentuk pelestarian dan pengembangan budaya daerah berupa Pagelaran seni tradisional, pelaksanaan upacara adat di 13 komunitas adat, pemeliharaan cagar budaya, hibah alat kesenian tradisional dan modern, revitalisasi seni tradisional sebanyak 2 grup.

Program dan kegiatan yang mendukung pada peningkatan pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan daerah adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, pagu

anggaran sebesar Rp. 3.952.973.900,-, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan pagu anggaran Rp. 99.999.900,-

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 149.920.200,-

Sedangkan program dan kegiatan yang mendukung pada keberhasilan meningkatnya kunjungan wisatawan ada 3 program dan 3 kegiatan dan 5 Sub kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pameran di Kabupaten Garut dan diluar Kabupaten Garut, mempromosikan melalui media elektronik, pembuatan sarana promosi, penataan /pembangunan di obyek wisata pengembangan Desa Wisata dan pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Proram dan Kegiatan adalah :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi, dengan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 22.117.832.010,-
- b. Program Pemasaran Pariwisata, kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan :
  1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam danLuar Negeri dengan pagu anggaran Rp. 374.999.500,-
  2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 525000000,-
- c. Program Pengembanan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan Sub Kegiatan :
  1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan pagu Rp. 324.000.000,-
  2. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan
  3. Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) dengan pagu Rp. 862.578.000,-

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai desentralisasi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi pada dasarnya kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai “pelaksana” setiap program bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan.

Sejalan dengan Misi Kabupaten Garut yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Pemuseuman
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8. Program Pemasaran Pariwisata
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun  
2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

## Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dan	Ca ta ta	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM		70	<b>22.062.699.304</b>				
	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		Disparbud		<b>125.000.000</b>	<b>DAU</b>			<b>260.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Percanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disparbud	3 Dokumen	25.000.000	DAU		3 Dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Disparbud	1 dokumen	10.000.000	DAU		1 dokumen	25.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disparbud	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Disparbud	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Disparbud	1 Dokumen	15.000.000	DAU	1 Dokumen	30.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Disparbud	5 Laporan	25.000.000	DAU	5 Laporan	50.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disparbud	10 Laporan	25.000.000	DAU	10 Laporan	50.000.000
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.999.983.943</b>			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Disparbud	64 Orang/bulan	6.999.983.943	DAU	64 Orang/bulan	7.000.000.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Paket	46.000.000	DAU	1 Paket	46.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Paket	440.000.000	DAU	1 Paket	440.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Disparbud	1 Paket	100.000.000	DAU	1 Paket	100.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Paket	143.173.000	DAU	1 Paket	99.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Disparbud	1 Paket	147.000.000	DAU	1 Paket	180.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disparbud	4 Dokumen	16.000.000	DAU	4 Dokumen	18.000.000

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disparbud	1 Laporan	100.000.000	DAU	1 Laporan	48.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Disparbud	1 Laporan	421.462.500	DAU	1 Laporan	198.000.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Disparbud	1 Dokumen	47.230.600	DAU	1 Dokumen	50.000.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>10.411.826.300</b>			<b>11.430.000.000</b>
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Disparbud	3 Unit	412.560.000	DAU	3 Unit	600.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Disparbud	3 unit	380.920.100	DAU	3 Unit	580.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Disparbud	1 Paket	50.000.000	DAU	1 Paket	50.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Disparbud	5 Unit	98.515.000	DAU	5 Unit	100.000.000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Disparbud	5 Unit	95.282.000	DAU	5 Unit	100.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disparbud	1 Unit	6.374.549.200	DAU	1 Unit	7.000.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disparbud	5 Unit	2.000.000.000	DAU	5 Unit	2.000.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disparbud	5 Unit	1.000.000.000	DAU	5 Unit	1.000.000.000
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.711.991.881</b>			

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disparbud	1 Laporan	30.000.000	DAU		1 Laporan	30.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disparbud	1 Laporan	200.000.000	DAU		1 Laporan	200.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	50.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Laporan	1.431.991.881	DAU		1 Laporan	400.000.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.353.031.080</b>				<b>901.000.000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disparbud	32 Unit	97.000.000	DAU		32 Unit	99.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disparbud	32 Unit	23.500.000	DAU		32 Unit	39.000.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Disparbud	1 Unit	30.000.000	DAU		1 Unit	30.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disparbud	2 Unit	50.000.000	DAU		2 Unit	50.000.000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Disparbud	4 Unit	33.000.000	DAU		4 Unit	33.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disparbud	1 Unit	959.531.080	DAU		5 Unit	500.000.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disparbud	1 Unit	100.000.000	DAU	1 Unit	100.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Disparbud	1 Unit	50.000.000	DAU	1 Unit	50.000.000
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				<b>6.733.630.000</b>			
		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah</b>				<b>713.630.000</b>	<b>DAU</b>		<b>6550.000.000</b>
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dalam rangka 1 Muharam	Disparbud	4 Objek	563.630.000	DAU	10 Objek	500.000.000
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disparbud	50 Orang	150.000.000	DAU	50 Orang	150.000.000
		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>6.020.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3.000.000.000</b>
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan, Hibah Alat Kesenian	Kab.Garut	3 Objek/30 Grup	6.020.000.000	DAU	4 Objek/80 Grup	3.000.000.000
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>				<b>130.505.400</b>			
		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Kab/Kota</b>				<b>130.505.400</b>			
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	100 Orang	130.505.400	DAU	100 Orang	104.464.200
		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>				<b>350.000.000</b>			

		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah</b>				<b>350.000.000</b>			
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Kab. Garut	50 Orang	150.000.000	DAU		50 Orang 150.000.000
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Garut Kota	2 Dokumen	200.000.000	DAU		2 Dokumen 200.000.000
		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>				<b>696.387.700</b>			
		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>				<b>696.387.700</b>			
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Garut	3 Objek	50.000.000	DAU		3 Objek 50.000.000
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Garut	3 Objek	646.387.700	DAU		3 Objek 200.000.000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>				<b>450.000.000</b>			
		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>				<b>450.000.000</b>			
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan	Kab. Garut	50 Orang	150.000.000	DAU		50 Orang 150.000.000
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Garut	5 Unit	100.000.000	DAU		5 Unit 100.000.000
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Garut	5 Unit	200.000.000	DAU		5 Unit 200.000.000
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI</b>				<b>51.873.241.796</b>			
		<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata</b>				<b>45.813.545.000</b>			
		Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	4 Lokasi	1.000.000.000	DAU		4 Lokasi

		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	200.000.000	DAU	1 Dokumen	
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) dan Jumlah Desa Wisata yang Dikembangkan	Kab. Garut	4 Lokasi dan 45 Dewi	44.600.000.000	DAU	4 Lokasi dan 42 dewi	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kab. Garut	1 Dokumen	13.545.000	DAU	1 Dokumen	200.000.000
		<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				<b>1.950.000.000</b>			<b>2.300.000.000</b>
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	5 Dokumen	500.000.000	DAU	5 Dokumen	500.000.000
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	3 Dokumen	200.000.000	DAU	3 Dokumen	200.000.000
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Garut	3 Kawasan	200.000.000	DAU	3 Kawasan	500.000.000
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	5 Unit	500.000.000	DAU	5 Unit	500.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	50.000.000

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Kab. Garut	1 Laporan	50.000.000	DAU	1 Laporan	50.000.000
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Kab. Garut	5 Lokasi	500.000.000	DAU	5 Lokasi	500.000.000
		<b>Pengelolaan destinasi Pariwisata kab/kota</b>				<b>3.809.696.796</b>			<b>4.300.000.000</b>
		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Kab. Garut	5 Lokasi	1.000.000.000	DAU	5 Lokasi	1.000.000.000
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	10 Dokumen	100.000.000	DAU	10 Dokumen	1.000.000.000
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Garut	3 Lokasi	1.000.000.000	DAU	3 Lokasi	1.000.000.000
		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Garut	5 Unit	500.000.000	DAU	5 Unit	500.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Garut	5 Dokumen	183.886.096	DAU	5 Dokumen	200.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Laporan	525.810.700	DAU	1 Laporan	100.000.000

		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata	Kab. Garut	5 Lokasi	500.000.000	DAU	5 Lokasi	500.000.000
		<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>300.000.000</b>			<b>600.000.000</b>
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran	Kab. Garut	1 Dokumen	100.000.000	DAU	1 Dokumen	100.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Kab. Garut	1 Dokumen	100.000.000	DAU	1 Dokumen	100.000.000
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kab. Garut	2 Laporan	0	DAU	2 Laporan	100.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha	Kab. Garut	3 Laporan	100.000.000	DAU	3 Laporan	100.000.000
		Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Kab. Garut	10 Unit Usaha	0	DAU	10 Unit Usaha	200.000.000
		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>				<b>1.150.000.000</b>			
		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Kemitraan Pariwisata</b>				<b>1.150.000.000</b>			<b>1.150.000.000</b>
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Garut	5 Dokumen	400.000.000	DAU	5 Dokumen	400.000.000
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri/ Jumlah Pameran	Kab. Garut	4 Laporan/ 3 Kegiatan	300.000.000	DAU	4 Laporan	300.000.000

		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Garut	2 Dokumen	300.000.000	DAU	2 Dokumen	300.000.000
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Garut	2 Dokumen	150.000.000	DAU	2 Dokumen	150.000.000
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>				<b>0</b>			
		<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>0</b>			
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab. Garut	1 Unit	0	DAU	1 Unit	
		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>				<b>0</b>			
		Pengembangan Riset	Jumlah Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	
		Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	
		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	1 Laporan	0	DAU	1 Laporan	
		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	1 Unit	0	DAU	1 Unit	

			Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	
			Pemberian Insentif	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Insentif	Kab. Garut	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	
			Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				<b>1.720.000.000</b>				
			<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>				<b>1.720.000.000</b>				<b>1.720.000.000</b>
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Kab. Garut	50 Orang	170.000.000	DAU		50 Orang	170.000.000

			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Garut	100 Orang	300.000.000	DAU		100 Orang	300.000.000
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Garut	50 Orang	150.000.000	DAU		50 Orang	150.000.000
			Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Garut	50 Orang	200.000.000	DAU		50 Orang	200.000.000
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi	Kab. Garut	4 Laporan	500.000.000	DAU		4 Laporan	500.000.000
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Garut	100 Orang	400.000.000	DAU		100 Orang	400.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada dasarnya pembangunan dan penataan Kabupaten Garut adalah untuk kesejahteraan warganya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan, namun demikian daya tarik Kabupaten Garut kenyataan dapat menarik wisatawan dari wilayah lain bahkan negara lain. Kabupaten Garut merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pariwisata Provinsi Jawa Barat . Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut merupakan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga mampu memacu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata seperti akomodasi, makanan, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan usaha lain yang terkait.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

1. Infrastruktur dasar pariwisata belum optimal, faktor yang mempengaruhi secara internal koordinasi, Master Plan sedangkan secara eksternal adalah dana dan ego sektoral
2. Sadar wisata dan sapta pesona masih kurang dikarenakan kurangnya koordinasi dan pembinaan (internal) sedangkan secara eksternal kultur masyarakat
3. Masih kurangnya promosi disebabkan kurangnya material promosi dan partisipasi pelaku usaha pariwisata.
4. Pelestarian seni budaya daerah belum optimal karena tidak adanya Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKEDA) dan kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

- a. Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur (aksesibilitas, transportasi, telekomunikasi dan petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi dilokasi lokasi wisata.
- b. Kurangnya pemahaman SDM Wisata tentang sapta pesona wisata serta kurangnya SDM Wisata yang mampu berbahasa asing.

- c. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas.
- d. Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional belum efektif.
- f. Pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- g. Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2023 pada dasarnya pengakomodasian program, kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal yaitu memecahkan permasalahan yang dihadapi

Dinas pariwisata dan Kebudayaan serta pengakomodasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrembang desa, kecamatan dan kabupaten. Dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun anggaran 2023 hanya sebagian kecil program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat karena keterbatasan anggaran

Rencana Kerja pada tahun 2023 disusun dengan mengakomodasikan unit unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang terdiri dari urusan Wajib dan pilihan yang menjadi tugas, fungsi dari masing – masing bidang. Adapun matrik rencana kerja tahun 2023 sebagaimana terlampir

Pada Rencana kerja tahun 2023 terdapat sub kegiatan baru yang mana di dokumen perubahan renstra belum ada, namun secara kebutuhan diperlukan dan dicantumkan pada renja 2023 dikarenakan adanya penyesuaian Kepmen 050 tahun 2021 seperti sub kegiatan perencanaan Kawasan strategis pariwisata kab/kota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat rancangan kerangka isu strategis, visi, misi, kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran, serta indikatif program kegiatan. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

Renja yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi unit kerja bidang maupun sekretariat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Bagi unit kerja bidang, RENJA Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan masing-masing bidang, yang berupa kerangka anggaran dalam penyusunan PPAS, RKA, dan DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program kegiatan, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing – masing bidang maupun sekretariat perlu membuat PPAS, RKA dan DPA tahun anggaran 2023, sebagai berikut:
  - a. Dalam membuat PPAS dan RKA, wajib melakukan aspirasi SOPD dan stakeholders sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b. Uraian penggunaan PPAS, RKA dan DPA tahun anggaran 2023, merupakan program kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan;
  - c. Uraian penggunaan PPAS, RKA dan DPA tahun anggaran 2023, merupakan program kegiatan untuk mencapai prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya.
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap bidang maupun sekretariat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan kegiatan koreksi yang diperlukan dan melaporkan

hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pada akhir tahun anggaran, setiap bidang maupun sekretariat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
  - a. Pelaksanaan Program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan. Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam RENJA, seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas fungsi yang melekat pada masing-masing bidang maupun sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**